

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi covid-19 terjadi hampir diseluruh penjuru dunia yang pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada tahun 2019. Sedangkan kasus Covid-19 pertama kali di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Corona virus disease (Covid-19) merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus Sars-CoV-2 yang menginfeksi pada saluran pernafasan manusia dan tidak memandang usia mulai dari balita hingga lansia dapat terinfeksi oleh virus tersebut. Virus corona dapat dengan mudah dan cepat menular hanya melalui kontak langsung dengan yang sudah terinfeksi sehingga penyebarannya sangat cepat. Pertama kali diumumkan Covid-19 sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020 lalu oleh World Health Organization jumlah infeksi di dunia telah mencapai lebih dari 121.000. (Pasai 2021)

Pemerintah terus meningkatkan berbagai upaya yang bertujuan mengendalikan laju lonjakan kasus positif Covid-19 dengan membuat beberapa aturan untuk menerapkan 3M antara lain Memakai masker, Menjaga jarak dan Mencuci tangan (Kominfo 2021). Selain itu, pemerintah juga membuat kebijakan terkait pembatasan kegiatan masyarakat. Dalam peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk menekan angka positif covid-19 dan diterapkan diberbagai daerah di Indonesia. Pembatasan Sosial Berskala Besar bertujuan untuk membatasi kegiatan masyarakat diluar rumah dan diterapkan sanksi bagi yang

melanggar. Selain itu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berdasarkan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 15 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di wilayah Jawa dan Bali. Dengan adanya beberapa kebijakan yang bertujuan untuk membatasi kegiatan masyarakat tersebut tentunya akan menghambat produktifitas masyarakat.

Pandemi Covid-19 memberi dampak besar bagi beberapa aspek, diantaranya berdampak pada aspek kesehatan, pendidikan, sosial dan perekonomian. Beberapa negara mengalami dampak yang besar pada sektor perekonomian khususnya. Dengan adanya pandemi Covid-19 ini akan memberikan dampak terhadap operasional perdagangan, pelaksanaan bisnis dan nilai tukar sehingga menimbulkan ancaman terjadinya krisis global. Ancaman akan terjadi peningkatan kemiskinan di beberapa negara yang terdampak Covid-19. Masyarakat akan kehilangan pekerjaannya karena kurangnya pendapatan dan produktifitas perusahaan yang kemudian menyebabkan tingkat pengangguran tinggi. Berdasarkan dari laporan *Organization of Economic Co-operation and Development (OECD)* perekonomian di Asia akan mengalami pertumbuhan yang negatif yang diakibatkan dari pandemi Covid-19 dengan rata-rata terendah 2,9% (OECD 2020). Sedangkan perekonomian merupakan faktor yang mendadakan kemajuan suatu negara.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian suatu negara. Pemerintah sangat merasa terbantu dengan adanya UMKM yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga akan menurunkan angka pengangguran dan secara otomatis

akan mengurangi angka kemiskinan pada suatu negara. Pada UMKM yang sudah tergolong maju mampu melakukan kegiatan ekspor sehingga mampu menyumbang terhadap *Product Domestic Bruto* (PDB) karena dapat menghasilkan jumlah devisa yang cukup besar. (Srijani 2020)

Dengan adanya pandemi Covid-19 ini sangat berdampak khususnya bagi UMKM. Di Indonesia, UMKM dijadikan sebagai tulang punggung perekonomian nasional yang menjadi penentu masa depan Indonesia yang terdampak pada pandemi ini. Terjadinya penurunan omset secara drastis baik UMKM pada skala besar maupun kecil bahkan usaha UMKM juga banyak yang tidak mendapatkan pemasukan. Semua bidang UMKM baik kuliner, jasa, hingga kerajinan semua terkena dampaknya yang membuat para pelaku usaha merasa sangat dirugikan dengan adanya pandemi ini.

Berdasarkan dari data Kementerian Koperasi yang memaparkan 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami penurunan pendapatan yang sangat besar. Kementerian Koperasi dan UMKM menjelaskan bahwa koperasi yang bergerak pada bidang jasa dan produksi juga paling terdampak pada pandemi Covid-19 karena para pengusaha UMKM mengalami penurunan penjualan, kekurangan modal untuk membuat produk, dan terhambatnya distribusi barang (Amri 2020). Pembatasan kegiatan di luar rumah juga membuat banyak UMKM yang terpaksa menghentikan kegiatannya. Dalam kondisi tersebut, UMKM mengalami penurunan penjualan akibat dari menurunnya aktifitas produksi. Sedangkan jika UMKM tidak dapat berhasil dalam menopang

perekonomian pada masa pandemi covid-19 ini akan menyebabkan perekonomian disuatu negara turun drastis.

Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia yang menerangkan bahwa penurunan perekonomian mempengaruhi aktivitas ekonomi yang kemudian membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian. Akibatnya, banyak pekerja yang dirumahkan atau diberhentikan (PHK) yang kemudian akan berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) per 7 April 2020 akibat pandemi covid-19 sebanyak 39.977 perusahaan di sektor formal yang merumahkan dan melakukan PHK terhadap pekerjanya. Jumlah pekerja yang terkena dampak sebanyak 1.010.579 orang dengan rincian 873.090 pekerja dari 17.224 perusahaan dirumahkan, sedangkan 137.489 pekerja di PHK dari 22.753 perusahaan. Di samping itu, jumlah perusahaan dan tenaga kerja yang terkena dampak di sektor informal sejumlah 34.453 perusahaan dan 189.452 orang pekerja (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 2021).

Tabel 1.1
Tabel Dampak Covid-19 pada Perekonomian Kulon Progo

No.	Dampak Covid-19 pada Perekonomian Kulon Progo	2019	2020	2021
1.	Pengangguran	4.710	10.005	9.920
2.	Kemiskinan	74.620	78.060	81.140

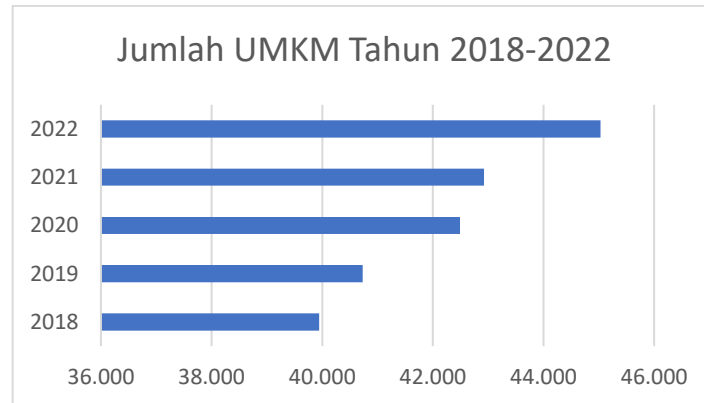
Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2021

Dalam pemaparan data yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2021 Covid-19 juga berdampak pada sektor perkonomian

di Kabupaten Kulon Progo. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah pengangguran di Kulon Progo yang awalnya pada tahun 2019 hanya sejumlah 4.710 jiwa kemudian meningkat drastis pada tahun 2020 menjadi sebanyak 10.005 jiwa dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 sebanyak 9.920 jiwa. Dengan meningkatnya pengangguran maka tingkat kemiskinan di Kulon Progo juga meningkat. Dalam data tersebut, pada tahun 2019 jumlah kemiskinan di Kulon Progo berjumlah 74.620 jiwa. Kemudian, meningkat pada tahun 2020 sejumlah 78.060 jiwa dan masih terus meningkat pada tahun 2021 dengan jumlah 81.140 jiwa.

UMKM yang diharapkan dapat menjadi penyelamat dalam sektor perekonomian dimana merupakan ujung tombak perekonomian ternyata juga terkena dampak Covid-19. Pada hakikatnya Kabupaten Kulon Progo terdapat banyak pelaku UMKM karena memiliki daya tarik pesona alam sehingga menjadikan Kulon Progo memiliki banyak potensi wisata alam yang indah. “Dimana ada destinasi wisata di situ pasti ada pelaku UMKM yang ikut meramaikan daerah tersebut.”(DINKOPUKM 2022a) Sehingga, kemajuan sektor pariwisata di Kulon Progo memberikan banyak peluang pemberdayaan UMKM. Wisatawan lokal maupun mancanegara mendorong UMKM Kulon Progo untuk mengenalkan produk lokalnya.

Gambar 1.1
Jumlah UMKM Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo

Berdasarkan data di atas, jumlah UMKM dari tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Pada tahun 2018 jumlah UMKM sebanyak 39.943 kemudian mengalami peningkatan jumlah UMKM menjadi 40.730 pada tahun 2019. Jumlah UMKM kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi sebanyak 42.493 dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebanyak 42.927 hingga tahun 2022 sebanyak 45.032. Produk UMKM yang terdapat di Kulon Progo didominasi dengan produk yang menjunjung nilai lokalitas daerahnya. Mulai dari produk kuliner lokal maupun kerajinan lokal yang menjadi ciri khas dari Kulon Progo. Melalui Bela- beli Kulon Progo dan Toko Milik Rakyat (TOMIRA) yang merupakan program yang bertujuan untuk mendukung UMKM dan meningkatkan minat terhadap produk lokal. Adanya New Yogyakarta International Airport (NYIA) juga menjadi pendorong untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM di Kulon Progo.

Tabel 1.2
Penurunan Pendapatan UMKM Tahun 2019-2021

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET (%)	RELISASI (%)
Pertumbuhan jumlah omset yang difasilitasi	2019	19,39	19,40
	2020	19,40	9,99
	2021	19,41	17,66

Sumber: LKJIP Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 dan 2021.

Menurut data dari LKJIP tahun 2019-2021 menjelaskan bahwa Pendapatan UMKM di Kulon Progo mengalami penurunan pada tahun 2020 dan tidak mampu mencapai target penjualan pada tahun 2020-2021. Hal tersebut menunjukan bahwa pandemi memberikan dampak bagi UMKM Kulon Progo yang berpengaruh pada sektor perekonomian di Kulon Progo karena UMKM merupakan ujung tombak ekonomi kerakyatan. Pada masa pandemi, UMKM mengalami tekanan produktifitas, khususnya kesulitan dalam memperoleh pemasukan untuk modal produksi karena menurunnya pemasaran produk. UMKM membutuhkan strategi mulai dari kemudahan regulasi, kemudahan izin, Perizinan Industri Rumah Tangga (PIRT), hingga pemasaran produk dan lebel halal. Pendampingan dari dinas terkait menjadi sangat penting dalam memfasilitasi upaya untuk membangkitkan kembali UMKM di Kulon Progo (Ridayanti dan Iwan Aminto Andi 2022) . Sehingga mereka mampu bersaing dan memenuhi persyaratan yang dikehendaki pasar.

Masa pasca pandemi merupakan waktu yang tepat untuk memulihkan kembali sektor perekonomian khususnya pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Setelah beberapa kebijakan pemerintah yang diterapkan mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

(PPKM) dan adanya anjuran Vaksinasi Covid-19 yang berhasil menurunkan angka positif Covid-19 di berbagai daerah di Indonesia salah satunya di Kabupaten Kulon Progo. Masyarakat mulai beraktifitas secara normal kembali dan sudah diperbolehkan untuk melakukan kegiatan di luar rumah. Hal ini, secara otomatis akan memberikan keuntungan bagi UMKM karena dapat melakukan kegiatan produksi dengan baik untuk mengganti banyak kerugian yang terjadi selama pandemi Covid-19. Sektor pariwisata di Kulon Progo juga sudah mulai beroperasi dengan baik sehingga dapat mendatangkan wisatawan lokal ataupun mancanegara sehingga dapat menjadi pendorong bangkitnya UMKM pada masa pasca pandemi.

Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu lembaga atau instansi pemerintah yang memiliki peran dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah. Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **Strategi Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo dalam Pemberdayaan UMKM Pada Masa Pasca Pandemi.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka didapatkan rumusan masalah yaitu **Bagaimana strategi pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo pada masa pasca pandemi covid-19?**

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemberdayaan usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo pada masa pasca pandemi covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat adanya penelitian ini adalah supaya dapat menjadi tambahan referensi dan meningkatkan wawasan serta pengetahuan yang berkaitan dengan strategi Dinas Koperasi UKM dalam pemberdayaan UMKM pada masa pasca pandemi.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti terkait dengan strategi pemberdayaan UMKM.
- b. Bagi pelaku UMKM, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan solusi dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan melalui pemberdayaan.
- c. Bagi Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pemikiran serta bahan pertimbangan dalam program yang berkaitan dengan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kulon Progo.

1.5 Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian mengenai strategi pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), seperti beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh:

Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Hasil Temuan
1.	Haris Ahmad Rizal, Maulana Rifai, Gungun Gumilar (2021) (H A Rizal, M Rifai 2021)	Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam Pemberdayaan UMKM	Strategi yang digunakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk pemberdayaan UMKM dengan menggunakan Teori Strategi Stephen P Robbins yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. Inovasi dengan membuat database UMKM yang berbentuk aplikasi merupakan program yang sedang dilakukan dan belum dapat diaplikasikan oleh pelaku UMKM dan masyarakat. Selain itu, pada Mall dan Galeri UMKM belum diaplikasikan secara keseluruhan di 31 Kecamatan.2. Deferensiasi Pasar Kuliner membutuhkan standar kualitas agar mendapatkan perizinan serta dapat menjadi produk unggulan di Kabupaten Bandung.3. Jangkauan, meskipun sudah beberapa pelaku UMKM memanfaatkan teknologi digital dalam <i>marketplace</i> tetapi masih ada pelaku UMKM di Kabupaten Bandung memiliki jangkauan yang kecil

			<p>karena kurangnya pengetahuan terkait dengan teknologi.</p> <p>4. Pengendalian Biaya, terdapat masalah yang sering timbul adalah masalah modal dan hal tersebut erat hubungannya dengan koperasi dan perbankan. Selain itu, masalah yang sering di temui yaitu kesulitan dalam pembayaran bunga sehingga pelaku UMKM menginginkan penyediaan modal yang tidak menggunakan sistem bunga.</p>
2.	Jaelani, Zahratul, Saddam (2022) (Jaelani, Zahratul 2022)	Strategi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Era Digital	Hasil dari penelitian strategi yang dilakukan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh adalah dengan pendekatan pembinaan melalui sosialisasi, pelatihan-pelatihan, fasilitas kebutuhan para pelaku UMKM dan pendampingan. Namun, dalam realisasi kegiatan belum dapat dikatakan optimal karena kurangnya kegiatan pendampingan digitalisasi yang dilakukan tidak terjadwal secara berkala. Sehingga strategi yang dilakukan belum secara optimal dan tepat sasaran.
3.	Sindi Ariana Putri (Putri 2022)	Strategi Dinas Koperasi dan UKM dalam Memberdayakan UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara	Strategi Dinas Koperasi yang dapat dilakukan untuk memberdayakan UMKM pada masa pandemi di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan bantuan permodalan maupun bantuan bahan produksi kepada pelaku UMKM

			<p>2. Memfasilitasi para pelaku UMKM untuk mempromosikan dan menjual produk-produk secara <i>online</i></p> <p>3. Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan</p> <p>4. Memberikan fasilitas kemudahan dalam mendapatkan modal bagi para pelaku UMKM</p> <p>5. Menuntut para pelaku UMKM untuk dapat mengembangkan nilai kreatifitas yang ada pada diri pelaku UMKM dan dituntut inovatif</p>
4.	Azizah Mursyidah (2021) (Mursyidah 2021)	Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Cibunian	<p>Hasil dari penelitian strategi pemberdayaan UMKM dilakukan dengan beberapa pilihan strategi, yaitu:</p> <p>1. Kemudahan pada akses permodalan Sistem permodalan dari BUMDES bersifat non profit dan alokasi dana bentuk produktif jadi masyarakat diharuskan mempunyai usaha berdasarkan keahlian masing-masing dan melakukan pengembalian dana sesuai perjanjian diawal dana diterima.</p> <p>2. Pelatihan SDM Dalam pelatihan ini dilakukan sosialisasi dan edukasi pelatihan bisnis digital melalui <i>marketplace</i>.</p> <p>3. Kemitraan Sebagai produktifitas berkembangnya usaha, maka penulis melakukan kerjasama dengan tokoh masyarakat dan aktivis desa untuk membentuk</p>

			<p>kemitraan terkait sarana distribusi dan pemasarannya sehingga mampu meningkatkan pemasukan para mitra UMKM dan meningkatkan kesejahteraan.</p> <p>4. Dukungan dari <i>stakeholder</i></p> <p>Dalam hal ini dukungan <i>stakeholder</i> dalam bentuk bantuan modal usaha dengan syarat yang ringan, jaminan dalam mendapatkan pembiayaan ringan, promosi iklan gratis, kemudahan memperoleh pembiayaan dan pengurusan administrasi, dana UMKM terealisasi secara merata, bagi hasil yang adil.</p>
5.	Melati Sukma, Yose Rizal, Roni Ekha Putera (2021). (Sukma, Yoserizal, and Putera 2021)	Pemberdayaan UMKM Terdampak Pandemi Covid-19 oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang	<p>Pemberdayaan UMKM terdampak pandemi Covid-19 oleh Dinas Koperasi dan UMKM kota padang secara Keseluruhan sudah berjalan dengan baik pada semua aspek.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap penyadaran yang memunculkan kesadaran dari pemberdayaan UMKM yang terdampak covid-19 di Dinas Koperasi UMKM Kota Padang. Tahapan terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang 2. Tahap transformasi pengetahuan yaitu pemformulasian rencana aksi tersusun dengan baik. 3. Tahap kemandirian merupakan tahapan pada saat masyarakat sudah dapat melakukannya secara mandiri masyarakat dapat menyelesaikan

			<p>pembuatan masker tepat dengan waktu yang telah diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dan mendapatkan reward dari pemerintah dengan mendapatkan DID (Dana Insentif Daerah) kemudian UMKM juga diberdayakan lagi dengan diberikan pelatihan-pelatihan dengan tujuan untuk dapat mengembangkan kemampuan produk yang dihasilkan di tengah situasi pandemi Covid-19.</p>
6.	<p>M. Salahudin, Sri Nur Hidayati, Chintya Nur Alfitri (2021) (Salahuddin, Nurhidayati, and Alfitri 2021)</p>	<p>Strategi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam Pemberdayaan UMKM Kabupaten Sumbawa di Masa Pandemi Covid-19</p>	<p>Strategi yang digunakan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa dalam pemberdayaan UMKM di masa pandemi Covid-19 yaitu pemberdayaan promosi produk usaha mikro, mendukung sarana prasarana, mendata UMKM yang menjadi penerima bantuan dari pemerintah melalui BPUM.</p>
7.	<p>Ajeng Wulansari, Lukmanul Hakim, Rachmat Ramadani (Wulansari et al. n.d.)</p>	<p>Strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang dalam Pemberdayaan UMKM</p>	<p>Strategi yang digunakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang untuk memberdayakan UMKM merujuk pada konsep pokok strategi yaitu inovasi, diferensiasi pasar, jangkauan dan pengendalian biaya. Dalam strategi inovasi Dinkop dan UMKM telah memberikan pembinaan dan pelatihan kepada para UMKM Kabupaten Karawang dan melakukan pengembangan UMKM melalui</p>

			<p>bimtek, diklat, studi banding, dan mengajak partisipasi BUMN. Pada diferensiasi pasar membahas terkait bagaimana Dinkop dan UMKM dapat merangkai strategi guna membantu para pelaku UMKM memperluas pemasaran hasil produksinya dengan cara melakukan pemasaran produk UMKM melalui bazar dan pasar online serta mengajak para pengusaha yang sudah memiliki outlet sendiri dalam rangka membantu pemasaran produk dari UMKM pemula. Dalam dimensi jangkauan strategi, terdapat program pemberdayaan UMKM melalui dukungan kemasan, pendampingan sarjana untuk pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, fasilitasi kerjasama pemasaran produk unggulan, pemberdayaan produk unggulan <i>one village one product</i> dan fasilitasi sertifikat sehat dan sertifikat halal. Dan yang terakhir pada dimensi pengendalian biaya, Dinkop dan UMKM dalam memberikan pelatihan dan pembinaan kepada para pelaku UMKM terhalang oleh anggaran yang terbatas dalam menjalankan program pemberdayaan dan pemberdayaan UMKM kemudian melakukan kerja sama dengan BUMN dan swasta dalam pembinaan UMKM akan tetapi terbatas sehingga menghambat proses dan secara keseluruhan belum berjalan optimal.</p>
--	--	--	--

8.	Andi Sadiyah Rahmayani, Andi Aslinda (2021) (Rahmayani and Aslinda 2021)	Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	<p>Hasil dari penelitian menunjukkan strategi pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar menggunakan 5 indikator, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Indicator enabling</i> (pemungkinan) 2. <i>Indicator empowering</i> (penguatan) 3. <i>Indicator protecting</i> (perlindungan) 4. <i>Indicator supporting</i> (pendukungan) 5. <i>Indicator fostering</i> (pembinaan) <p>Strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar tidak berjalan secara optimal.</p>
9.	Jhon Wahidi, Juaris (2022) (Jhon Wahidi 2022)	Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Banda Aceh	<p>Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan di Kota Banda Aceh dalam pemberdayaan UMKM yaitu dengan melakukan pelatihan bagi pelaku usaha, memberikan bimbingan teknis dan pelatihan pemasaran produk online seperti aplikasi <i>e-commerce</i>, pemberian bantuan modal usaha yang bersumber dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 2.400.000,- maupun dari Pemerintah Kota Banda Aceh sebesar Rp. 1.000.000,- serta pemberian bantuan alat kerja dan penguatan alat usaha bagi pelaku usaha.</p>
10.	Indah Andayani,	Strategi Pemberdayaan	Strategi yang dilakukan untuk Pemberdayaan bagi Pelaku

	Maria Veronika Roesminingsih, Wiwin Yulianingsih (2021) (I Andayani, MV Roesmningsih 2021)	Masyarakat Pelaku UMKM di Masa Pandemi Covid-19	UMKM di masa pandemi yaitu dengan program pemberdayaan <i>digital marketing</i> yang dapat memberikan kesempatan pelaku UMKM dalam memulai usaha dengan sistem <i>online</i> pada aplikasi perdagangan seperti Go-Food, Grab Food, Shopee, Lazada atau memangatkan pasar media sosial Facebook, Instagram dan Twitter.
--	--	---	--

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, penelitian yang terkait dengan strategi pemberdayaan UMKM sudah banyak dilakukan sebelumnya. Penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Rizal et al., 2021) yang memiliki kesamaan pada teori Stephen P Robbins yang akan digunakan dalam penelitian. Akan tetapi perbedaannya yang dilakukan pada penelitian yang peneliti lakukan fokus pada strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM terhadap pemberdayaan UMKM pada masa pasca pandemi Covid-19. Selain itu, penelitian lain yang relevan terkait dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terdapat perbedaan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak pada lokasi penelitian, peneliti akan melakukan penelitian di Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Strategi

Kata strategi berasal dari Bahasa Yunani "*strategos*" yang berarti membuat rencana untuk memenangkan musuh. Strategi merupakan rencana mengenai cara suatu lembaga atau perorangan untuk dapat mencapai tujuan dalam jangka waktu

yang cepat. Strategi merupakan suatu kombinasi antara pengambilan keputusan secara alamiah dan proses pemikiran rasional. Menurut Clausewitz, strategi merupakan suatu seni menggunakan pertempuran untuk memenangkan suatu perang dan suatu rencana jangka panjang dalam proses pencapaian tujuan. Strategi berisi suatu aktivitas-aktivitas penting yang akan digunakan dalam mencapai tujuan (Yunus 2016).

Menurut Tjiptono (2000) strategi merupakan suatu pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi dari suatu aktivitas dalam kurun waktu tertentu yang di dalamnya terdapat kordinasi tim kerja, memiliki tema mengidentifikasi faktor pendukungnya sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisiensi dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Menurut David (2013) strategi merupakan sarana bersama yang memiliki tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi merupakan aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah yang besar. Jadi strategi adalah suatu aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang maupun perusahaan yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan strategi menurut Rangkuti (2013) strategi merupakan suatu rencana induk yang komprehensif, yang menjelaskan cara perusahaan untuk mencapai semua tujuan yang telah di tetapkan berdasarkan misi yang sebelumnya telah di tetapkan. Menurut Sofyan (2015) strategi berarti suatu rencana kegiatan

keseluruhan yang disusun dengan sistematis dan bersifat umum, oleh karena itu dapat diketahui oleh setiap orang yang berada dalam perusahaan maupun luar perusahaan, tetapi taktik cara perusahaan dalam pelaksanaan strategi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan harus dirahasiakan dan tidak setiap orang dapat mengetahuinya.

Dari beberapa pengertian mengenai strategi dapat didefinisikan secara umum bahwa strategi merupakan suatu cara atau rencana yang digunakan untuk mendapatkan atau memenangkan suatu kompetisi dari pesaing.

Strategi memiliki banyak aspek. Berikut beberapa aspek yang penting Diatprasojo (2018), yaitu:

1. Strategi sebagai *statement* pernyataan tujuan dan maksud tujuan atau harus bertindak sebagai penggerak masa depan. Peran strategi yaitu menentukan, mengklarifikasi atau menyempurnakan tujuan.
2. Strategi sebagai suatu rencana tingkat tinggi. Strategi juga memperhatikan cara untuk mencapai maksud atau tujuan. Secara umum strategi lebih mengarah pada tingkat yang lebih tinggi dan mengambil keseluruhan pandangan seperti rencana lebih rinci, lebih kuantitatif, dan lebih jelas mengenai waktu serta tanggung jawab.
3. Strategi sebagai alat untuk mengalahkan kompetisi. Tujuan strategi adalah kemenangan/keberhasilan atau dapat mengalahkan musuh dalam suatu persaingan. Oleh karena itu, strategi dibutuhkan agar tetap berada di depan pesaing sebagai suatu kekuatan.

4. Strategi sebagai suatu unsur kepemimpinan. Strategi sangat berkaitan dengan kepemimpinan dan menetapkan pengaturan merupakan salah satu tanggung jawab para pemimpin. Jika pemimpin berubah, strategi cenderung akan berubah. Begitu juga sebaliknya, apabila strategi perlu perubahan mungkin juga perlu penunjukan pemimpin baru.
5. Strategi sebagai cara dalam penempatan posisi untuk masa depan. Untuk itu, strategi bertujuan memposisikan perusahaan untuk masa depan agar siap menghadapi ketidakpastian. Cara untuk mencapainya dengan membuat perusahaan lebih bisa untuk beradaptasi.
6. Strategi sebagai kemampuan membangun. Strategi berasal dari budaya yang tertanam dan setiap perusahaan menganut budaya masing-masing. Budaya mudah diamati tetapi sangat sulit dirubah. Oleh karena itu, strategi yang digunakan oleh perusahaan sebagian ditentukan oleh budaya itu.

Menurut Stephen P Robbins dalam buku (Kusdi 2009) terdapat empat dimensi pokok yang terkandung dalam strategi, yaitu:

- 1) Inovasi, strategi inovasi dilakukan secara khusus oleh perusahaan-perusahaan yang mengutamakan inovasi sebagai sumber keunggulan bersaing.
- 2) Defernsiasi Pasar, strategi ini bertujuan untuk menciptakan loyalitas konsumen melalui suatu produk atau jasa yang bersifat unik dalam artian berbeda dengan yang telah ada di pasar.

- 3) Jangkauan, merupakan penetapan ruang lingkup pasar yang akan dilayani oleh organisasi, ragam atau jenis konsumen, cakupan geografinya dan jenis produk atau jasa yang akan digunakan.
- 4) Pengendalian biaya adalah sejauh mana perusahaan mengontrol biaya atau anggaran secara ketat.

1.6.2 Manajemen Strategi

Manajemen strategi merupakan rangkaian atau proses kegiatan dalam mengambil keputusan secara mendasar dan menyeluruh serta menetapkan cara pelaksanaannya. Manajemen strategi dibuat oleh pemimpin kemudian dilaksanakan oleh seluruh jajaran yang ada pada suatu organisasi yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Wheleen dan Hunger (2009) manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang.

Manajemen strategik memiliki karakteristik dalam upaya merelalisasikan tujuan yang telah dirancang. Berikut adalah karakteristik manajemen strategik (Yunus 2016):

- 1) Manajemen strategik bersifat jangka panjang
- 2) Manajemen strategik bersifat dinamik
- 3) Manajemen strategik merupakan sesuatu yang berpadu oleh manajemen operasional
- 4) Manajemen strategik perlu dimotori oleh unsur-unsur pada manajer tingkat puncak
- 5) Manajemen strategik berorientasi dan mendekati masa depan

6) Manajemen strategik senantiasa harus didorong dan didukung dalam pelaksanaannya oleh semua sumber daya ekonomi yang tersedia.

Tahapan dalam manajemen strategi menurut Fred R. David (2004:6-7) dalam upaya pencapaian tujuan, yaitu:

- 1) Perumusan strategi yang meliputi kegiatan untuk mengembangkan visi dan misi organisasi, identifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi, penentuan kekuatan dan kelemahan internal organisasi, penetapan tujuan jangka panjang, pembuatan beberapa strategi alternatif serta pemilihan strategi tertentu untuk digunakan.
- 2) Pelaksanaan strategi yaitu dengan mengharuskan perusahaan untuk menetapkan sasaran, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya hingga perumusan strategis dapat dilakukan.
- 3) Pelaksanaan strategi yang mencakup pemberdayaan budaya, menciptakan struktur organisasi yang efektif, mengarahkan kembali usaha-usaha pemasaran, penyiapan anggaran, pemberdayaan dan pemanfaatan sistem informasi serta menghubungkan kompensasi untuk karyawan dengan kinerja organisasi
- 4) Evaluasi strategi yang merupakan tahap akhir yang dilakukan dengan mengkaji ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi pokok perumusan strategi yang diterapkan saat ini. Selain itu, pengukuran kinerja dan evaluasi perlu dilakukan karena keberhasilan saat ini bukan jaminan untuk keberhasilan masa depan.

1.6.3 Pemberdayaan

Secara konseptual, pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata “*power*” yang memiliki arti kekuasaan atau keberdayaan. Pemberdayaan merupakan suatu proses perubahan yang memiliki tujuan untuk membangun kesadaran akan potensi yang dimiliki. Dalam pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, definisi pemberdayaan merupakan cara yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk perubahan iklim dan pemberdayaan usaha terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Definisi pemberdayaan menurut Totok dan Poerwoko (2013:14) merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat termasuk yang mengalami kemiskinan. Pemberdayaan berfokus pada kemampuan untuk berpartisipasi untuk mendapatkan kesempatan terhadap akses sumber daya dan layanan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidupnya.

Menurut Suharto (2010) pemberdayaan merupakan proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan guna memperkuat kekuatan dan keberdayaan kelompok yang lemah di masyarakat. Sedangkan sebagai tujuan, pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai dalam suatu perubahan sosial.

Menurut Sumaryadi (2005) pemberdayaan adalah suatu upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat

dengan tujuan supaya masyarakat mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.

Menurut Pranarka dan Prijono (1995) konsep pemberdayaan dapat dibagi menjadi 3 fase, yaitu:

- 1) Fase Inisial, berasal dari pemerintah, oleh pemerintah, dan di tujukan bagi rakyat. Dalam fase inisial pemerintah memiliki peranan penuh bagi masyarakat. Pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo yang memiliki tanggung jawab sebagai institusi pemerintahan dalam lingkup pemberdayaan koperasi dan UKM. Adapun indikator dalam proses pemberdayaan pada fase inisial ini, yaitu:
 - a) Pelatihan yang merupakan suatu aktivitas atau kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Pelatihan melibatkan segenap sumber daya manusia supaya mendapatkan pengetahuan dan keterampilan pembelajaran sehingga dapat segera digunakan dalam pekerjaan. Pada dasarnya pelatihan dilakukan bertujuan meningkatkan keterampilan bekerja sehingga dapat menghasilkan produktivitas kerja.
 - b) Penyuluhan atau penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai program kerja baru atau fasilitas baru agar tidak terjadi kesalahan dan pelaksanaan program atau kesalahan dalam penggunaan fasilitas.
 - c) Kebijakan merupakan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengatur program kerja dari setiap divisi atau organisasi dibawahnya sehingga tidak bertentangan dengan tujuan dari pemerintah itu sendiri.

2) Fase Partisipatoris merupakan proses pemberdayaan yang berasal dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat dan diperuntukan bagi masyarakat. Pada fase partisipatoris melibatkan masyarakat secara aktif dalam kegiatan pembangunan yang bertujuan menuju kemandirian. Adapun indikator dalam fase partisipatoris, yaitu:

- a) Keterlibatan masyarakat dalam setiap program
- b) Antusias masyarakat dalam program pemberdayaan

3) Fase Emansipatoris merupakan proses pemberdayaan yang berasal dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Dalam fase emansipatoris masyarakat sudah menemukan kekuatan dalam dirinya, sehingga dapat melakukan kekuatan dirinya dan dapat melakukan pembaharuan dalam mengaktualisasikan diri. Adapun indikator dalam fase emansipatoris, yaitu:

- a) Aset
- b) Volume usaha
- c) Sisa hasil usaha

Adapun tujuan dalam pemberdayaan UMKM yang terdapat dalam pasal 5 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008, yaitu:

1. Mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang, berkembang dan berkeadilan
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri

3. Meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Selain itu, adapun prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, yaitu:

- 1) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk berkarya dengan prakarya sendiri
- 2) Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan
- 3) Pemberdayaan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- 4) Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- 5) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu.

1.6.4 Strategi Pemberdayaan

Terdapat lima program strategi pemberdayaan menurut Ismawan dalam Mardikanto dan Soebianto (2019) yaitu:

- 1) Pengembangan sumber daya manusia

Pada proses ini memiliki tujuan dalam peningkatan kualitas suatu individu untuk dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan wawasan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2) Pengembangan kelembagaan kelompok

Pengembangan kelembagaan kelompok merupakan seperangkat metode, strategi dan cara untuk memulihkan, memperbaiki dan meningkatkan koordinasi hubungan kerja dalam kelembagaan sehingga meningkatkan prestasinya.

3) Penumpukan modal masyarakat (swasta)

Profit dalam badan usaha swasta memiliki fungsi sebagai sumber pemupukan modal dan tidak boleh digunakan untuk penguasaan ekonomi oleh perorangan ataupun kelompok.

4) Pengembangan usaha produktif

Pengembangan suatu usaha merupakan tanggung jawab setiap masyarakat dan pemerintah desa yang membutuhkan pandangan ke depan, motivasi dan kreativitas. Pemerintah desa umumnya pada pengembangan usaha masyarakat desa harus dapat melihat suatu peluang, menangkap peluang dan memulai usaha serta menjalankan usaha hingga berhasil.

5) Penyediaan informasi tepat guna

Desa memiliki ciri khas masing-masing dalam berkomunikasi dengan warganya. Terdapat sistem informasi tradisional yang berkembang melalui metode papan pengumuman dan komunikasi lisan.

1.6.5 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan suatu usaha milik individu atau kelompok yang masih bergerak dalam skala kecil. Di Indonesia UMKM sangat berperan penting bagi roda

perekonomian. Hal ini dikarenakan, UMKM dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Hal ini selaras dengan pendapat menurut Rudjito, (2003), pengertian UMKM merupakan usaha yang berperan penting dalam perekonomian negara Indonesia, jika ditinjau dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, definisi UMKM berubah menjadi :

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.
- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pada Bab IV pasal 6 tentang kriteria UMKM dikelompokkan berdasarkan dengan kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.

Tabel 1.4
Tabel Klasifikasi UMKM

No.	Jenis Usaha	Kekayaan Bersih	Penjualan Tahunan
1.	Usaha Mikro	Maksimum Rp 50 juta	Maksimum Rp 500 jt
2.	Usaha Kecil	>Rp 50jt-500jt	>Rp 300 jt – 2,5 miliar
3.	Usaha Menengah	>Rp 500jt - < 1 miliar	>Rp 2,5 miliar -50 miliar

Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Sedangkan, kriteria menurut Badan Pusat Statistik (BPS) “penggolongan UMKM berdasarkan pada banyaknya pekerja yang bekerja tanpa memperhatikan seberapa banyaknya modal yang digunakan dan tanpa memperhatikan adanya penggunaan mesin atau tidak.” (Badan Pusat Statistik n.d.) Adapun kriteria UMKM dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Industri kecil adalah industri yang tenaga kerjanya sebanyak 5-9 orang.
- 2) Industri Mikro adalah industri yang tenaga kerjanya sebanyak 1-4 orang.

1.7 Definisi Konseptual

1.7.1 Strategi

Strategi merupakan suatu rencana yang dilakukan oleh individu atau kelompok, digunakan sebagai cara untuk mencapai tujuan tertentu dalam keperluan jangka panjang dengan menggunakan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Strategi juga digunakan sebagai cara yang digunakan untuk mencapai tujuan atau sasaran dengan efektif dan efisien.

1.7.2 Manajemen Strategi

Manajemen strategi merupakan suatu proses dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh organisasi secara mendasar atau menyeluruh yang digunakan untuk suatu tujuan.

1.7.3 Pemberdayaan

Suatu upaya yang dilakukan untuk mendampingi suatu kelompok untuk bertumbuh dan mengembangkan suatu potensi yang dimiliki melalui program-program yang sudah direncanakan sebelumnya.

1.7.4 Strategi Pemberdayaan

Strategi pemberdayaan merupakan suatu upaya yang dilakukan melalui beberapa proses dalam program-program dengan tujuan untuk mengembangkan suatu kelompok.

1.7.5 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang dimiliki oleh individu, kelompok atau badan usaha yang digolongkan berdasarkan pendapatan pertahun, jumlah kekayaan dan jumlah karyawan.

1.8 Defisini Operasional

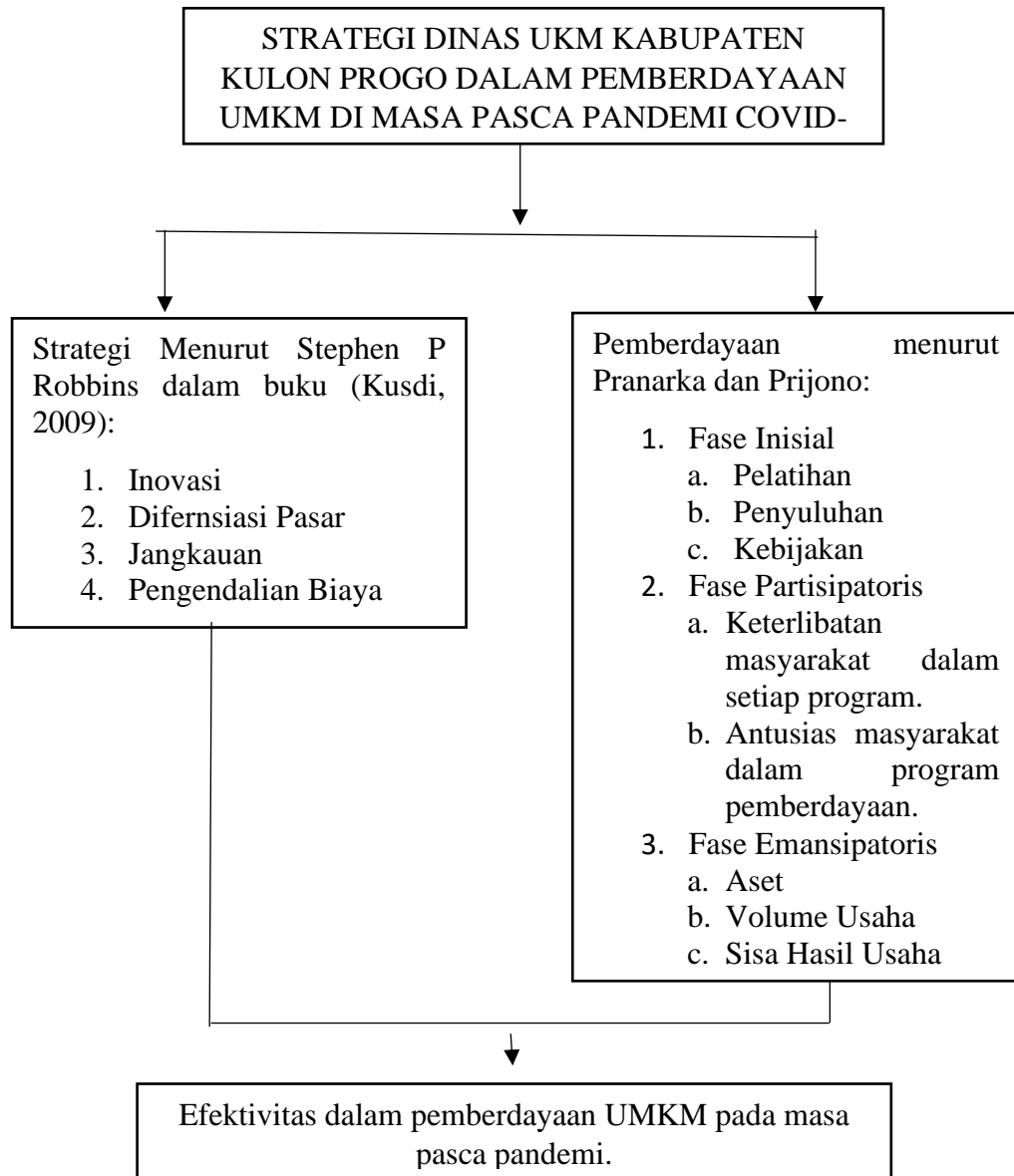
Tabel 1.5
Definisi Operasional

N o	Landasan Teori	Variabel	Indikator	Parameter
1.	Teori menurut Stephen P	Strategi	Inovasi	Terciptanya pembaharuan produk ke arah digital dengan

	Robbins dalam buku (Kusdi, 2009)			melakukan penjualan <i>online</i>
			Diferensiasi Pasar	Terciptanya produk yang beragam.
			Jangkauan	Memperluas segmentasi pasar
			Pengendalian biaya	Melakukan pembukuan keluar masuknya biaya
2.	Teori menurut Pranaka dan Prijono tentang Pemberdayaan	Pemberdayaan	Fase Inisial: a) Pelatihan b) Penyuluhan c) Kebijakan	a) Melakukan bimbingan teknik (bimtek) kepada pelaku UMKM b) Melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM c) Mengatur pelaksanaan program UMKM
			Fase Partisipatoris: a) Keterlibatan masyarakat dalam setiap program b) Antusias masyarakat dalam program pemberdayaan	a) Kehadiran/keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program b) Mengetahui sejauh mana respon pelaku UMKM dalam mengikuti program yang harus dijalankan
			Fase Emansipatoris: a) Aset b) Volume usaha c) Sisa Hasil Usaha	a) Modal yang digunakan pelaku usaha b) Total nilai atau penerimaan jasa pada suatu periode tahun c) Keberhasilan penerapan strategi pemberdayaan UMKM

1.9 Kerangka Berpikir

Bagan 1.1 Kerangka Berpikir



1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sukmadinata (2011) penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan serta menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap,

kepercayaan, persepsi dan orang secara kelompok ataupun individual. Data penelitian kualitatif berupa kata-kata, gambar, dan bukan dalam bentuk angka atau hitungan lainnya. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan tentang apa yang sedang diteliti dan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

1.10.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Dinas Koperasi UKM di Kabupaten Kulon Progo. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena ingin mengetahui lebih dalam mengenai Strategi Pemberdayaan pasca pandemi covid-19 yang digunakan oleh Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1.10.3 Jenis Data

1.10.3.1 Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang didapatkan langsung dari lapangan. Peneliti akan menggunakan teknik wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dalam proses pemberdayaan UMKM di Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo.

1.10.3.2 Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang digunakan untuk melengkapi sumber data primer yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini diperoleh dari catatan, buku, atau dokumen-dokumen yang diperoleh dari

pihak terkait ataupun diperoleh melalui internet yang berupa artikel atau jurnal yang relevan dengan strategi Dinas Koperasi UKM dalam pemberdayaan umkm.

1.10.4 Teknik Pengumpulan Data

1.10.4.1 Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan untuk melihat lebih dekat keadaan, kegiatan yang dilakukan atau perilaku objek sasaran. Peneliti akan melakukan pengamatan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan yaitu di Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo.

1.10.4.2 Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya secara langsung atau bertatap muka dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Teknik wawancara merupakan informasi yang diperoleh melalui jawaban narasumber sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Narasumber dalam wawancara ini adalah pegawai pemerintah yang bekerja di Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 1.6
Tabel Informan

No.	Informan/Narasumber	Bidang
1.	Siti Jamilah, S.H	Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Koperasi UKM Kulon Progo
2.	Drs. Sri Wahyuniarto	Kepala Bidang Permodalan Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo
3.	Ir. Ambar Utami Renaningsih, MMA	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo

Adapun narasumber dari para pelaku UMKM di Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 1.7
Tabel Narasumber Pelaku UMKM Kabupaten Kulon Progo

No.	Nama UMKM	Jenis Usaha
1.	Batik Kresnowati	Kerajinan Batik
2.	Sinar Abadi Batik	Kerajinan Batik
3.	Batik Sembung	Kerajinan Batik
4.	Omah Growol/ Stick Growol	Makanan
5.	SHN Kerajinan Logam dan Kaleng	Kerajinan Logam dan Kaleng
6.	Lestari Craft	Kerajinan Eceng Gondok

1.10.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dapat mendukung informasi terkait yang diperoleh dengan cara menelusuri data historis. Sebagian data yang tersedia berupa dokumen pribadi misalnya surat-surat, foto, rekaman, video dan lain-lain. Selain itu, dokumen resmi seperti laporan dan arsip penting lainnya.

1.10.5 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2019) teknik analisis data merupakan suatu proses pencarian dan penyusunan secara sistematis yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan melalui pengorganisasian data kedalam kategori, penjabaran kedalam unit-unit, melakukan sintesa, penyusunan kedalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain.

1.10.5.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang dilakukan melalui proses menggolongkan, mengarahkan, penyederhanaan atau membuang yang tidak perlu, dan mengorganisir data dengan sedemikian rupa sehingga dari data-data tersebut dapat ditarik kesimpulan.

1.10.5.2 Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan menyusun sekumpulan informasi yang diperoleh, sehingga mengarahkan pada suatu kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan.

1.10.5.3 Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah data sudah mencukupi dan terverifikasi yang dilakukan dengan cara pengambilan intisari dari rangkaian hasil penelitian melalui observasi dan wawancara.